

## PERANAN SAREKAT ISLAM (SI) DAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN POLITIK DAN PENDIDIKAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Iyus Jayusman<sup>1</sup>, Oka Agus Kurniawan Shavab<sup>2\*</sup>

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya

\*Email: okaaks@unsil.ac.id

Diterima: 30 Juli 2018, Disetujui: 17 Juni 2019, Dipublikasikan: 1 November 2021

**Abstract:** *The purpose of this study is to describe the role of Sarekat Islam and Muhammadiyah in politics and education during the 1911-1942 national movement. Sarekat Islam (1911) and Muhammadiyah (1912) became organizations carried out the struggle for Indonesian independence with religion as their basis. Both organizations fighting for the Indonesian independence with their respective paths and ideologies: Muhammadiyah was more concentrated in the field of education, while Sarekat Islam was in the political field. The method used in this study was a historical research with its stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The form of the role of Sarekat Islam during the national movement, especially in the political field, was through the labor movement, the Volksraad, and direct criticism of the government through a national congress held annually. It was different with the Muhammadiyah which was not directly involved with the political movements that emerged at that time, but this organization supported the struggle of political movements that fought for the aspirations of the Islamic community. At this time, Muhammadiyah was also heavily involved in the field of education, especially by establishing Muhammadiyah-assisted schools.*

**Keywords:** *education, Muhammadiyah, national movement, politics, Sarekat Islam*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peranan Sarekat Islam dan Muhammadiyah di bidang politik dan pendidikan pada masa pergerakan nasional Tahun 1911-1942. Organisasi perjuangan Sarekat Islam (1911) dan Muhammadiyah (1912) menjadi organisasi yang melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan agama sebagai landasan perjuangannya. Kedua organisasi ini sama-sama berjuang demi terciptanya kemerdekaan Indonesia, namun dengan jalan dan ideologinya masing-masing dimana perjuangan Muhammadiyah lebih terkonsentrasi di bidang pendidikan, sementara Sarekat Islam di Bidang Politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan tahapan-tahapannya, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan Historiografi. Bentuk peranan Sarekat Islam pada masa pergerakan nasional khususnya di bidang politik adalah melalui gerakan buruh, volksraad, dan kritik langsung terhadap pemerintah melalui kongres nasional yang diadakan setiap tahun. Lain halnya dengan organisasi Muhammadiyah yang tidak terlibat secara langsung dengan gerakan-gerakan politik yang muncul pada saat itu, namun organisasi ini mendukung perjuangan gerakan politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Islam. Pada masa ini, Muhammadiyah juga banyak terlibat dalam bidang pendidikan terutama dengan mendirikan sekolah-sekolah binaan Muhammadiyah.

**Kata Kunci:** Muhammadiyah, Pendidikan, Pergerakan Nasional, Politik, Sarekat Islam

## PENDAHULUAN

Organisasi perjuangan yang lahir dan tumbuh berkembang pada 1908-1945 memiliki perbedaan yang sangat tajam antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, organisasi perjuangan yang lahir saat itu hanya memfokuskan perjuangannya di sektor politik, budaya dan pendidikan saja; perbaikan ekonomi saja; dan lain-lain. Bagaimanapun perbedaan ini bukanlah suatu hal yang sangat membahayakan bagi perjuangan, justru ini merupakan suatu strategi yang sangat ampuh dalam usaha menentang kolonialisme Belanda. Pendapat tersebut ditunjang oleh suatu anggapan bahwa pergerakan nasional merupakan akumulasi dan integrasi dari perjuangan yang bergerak di sektor politik, ekonomi, agama, sosial-budaya, pendidikan dan yang lainnya. Semuanya berjuang untuk mencapai sasaran Indonesia merdeka dalam arti kemerdekaan yang sebenarnya. Artinya merdeka dari kemiskinan politik, ekonomi, agama, sosial-budaya, pendidikan dan lain-lain.

Organisasi perjuangan yang bernama Sarekat Islam (SI) (1911) dan Muhammadiyah (1912) yang akan dikaji dalam tulisan ini berjuang untuk tercapainya Indonesia merdeka dengan menjadikan agama sebagai landasan perjuangannya. Organisasi perjuangan tersebut masuk dalam klasifikasi organisasi perjuangan Nasionalis Keagamaan karena sifat perjuangannya menjadikan agama sebagai landasannya.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang bersifat sosio-keagamaan, SI sejak semula adalah gerakan politik yang berasaskan Islam. SI adalah transformasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan pada 11 November 1911, oleh Samanhudi, seorang pedagang muslim kaya di Surakarta, Jawa Tengah. Pada tahun 1912 atas inisiatif dari H.O.S. Cokroaminoto SDI menjadi SI (Suwarno, 2011). Noer (1988) menambahkan bahwa Samanhudi meminta agar H.O.S. Cokroaminoto berperan sebagai

pemimpin dalam organisasi kelompok dagangnya. Ia hidup dalam kurun waktu 1883-1934. (Ma'arif, 1985: 79).

Tujuan SI yang tercantum dalam anggaran dasar sebenarnya tidak muncul adanya kegiatan politik, tetapi kegiatan yang tercantum di dalamnya adalah memperjuangkan hak-hak yang sesungguhnya di bidang politik (Yasmis, 2009:26). Dengan adanya tujuan tersebut SI memberanikan diri untuk memperjuangkan keadilan dan menekan adanya penindasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh SI tidak hanya dilakukan melalui perjuangan pada gerakan buruh dan partai politik, tetapi juga melalui federasi nasional dan federasi internasional dengan tujuan untuk memperkokoh rasa persatuan dan menghimpun kekuatan untuk menentang pemerintah kolonial (Mulawarman, 2014:206).

Sementara itu, Muhammadiyah didirikan tahun 1912 yang diprakarsai oleh K.H. Ahmad Dahlan. Sejak awal kelahirannya, Muhammadiyah konsisten bergerak melakukan perbaikan kehidupan sosial dan pendidikan. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam muncul berdasarkan dorongan keadaan yang hadir dan mengelilingi dunia Islam di Indonesia pada awal abad ke 20, yaitu keadaan sosial politik, budaya dan keagamaan (Sairin: 1995). Adapun Muhammadiyah tidak pernah menyatakan nonkooperasi atau kooperasi dengan pemerintah Hindia Belanda dalam melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia (Hanifah:2010).

Tujuan Muhammadiyah sendiri yaitu memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda (Suwarno, 2011:39). Sementara itu, pergerakan yang dilakukannya adalah kegiatan dakwah Islam amar maruf nahi munkar, seperti kegiatan sosial dan pendidikan." (Hasyim 1990:47). Pada awal didirikannya memang Muhammadiyah bergerak dalam

kegiatan politik, namun menariknya memberikan kebebasan kepada anggota-anggotanya untuk bergerak dalam kegiatan politik, seperti K.H. Ahmad Dahlan dalam Jamiatul Khair (Arifin, 1990:100). Anggota yang lainnya adalah K.H. Fakhruddin yang pernah menduduki posisi bendahara di organisasi SI.” (Hadikusuma T.T:28). Muhammadiyah dan SI sendiri sebenarnya memiliki ikatan yang kuat dalam pergerakan nasional dengan alasan bahwa SI membutuhkan Muhammadiyah untuk meningkatkan pengaruh politik dan Muhammadiyah membutuhkan SI untuk menyalurkan aspirasi politiknya (Arifin, 1990:103).

#### **METODE PENELITIAN**

Ketepatan pemilihan metode untuk melakukan suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dan akan sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Sehubungan masalah yang akan diteliti adalah kejadian masa lalu, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *metode sejarah*. Metode sejarah adalah suatu cara atau proses untuk mengungkap serta merekonstruksi kejadian masa lalu yang kemudian disusun secara sistematis yang tertuang dalam sebuah kisah, yakni kisah sejarah. Garraghan (1957:33) menambahkan bahwa metode sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip untuk membantu pengumpulan sumber-sumber sejarah, menguji sumber-sumber tersebut secara kritis, dan menyajikannya ke dalam bentuk sintesis dari hasil-hasil yang dicapai.

Mengenai langkah-langkah metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

1. *Heuristik*, yaitu langkah pencarian sumber, bukti-bukti yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. *Kritik*, yaitu proses atau upaya pengkritikan terhadap sumber, bukti-bukti yang diperoleh pada langkah pertama di atas

sehingga lahir fakta. Proses pengkritikan ini ditempuh dengan melalui dua cara, yaitu kritik ekstern untuk menguji otentisitas atau keaslian sumber atau bukti-bukti sejarah. Sedangkan kritik intern untuk menguji kredibilitas tidaknya dari sumber.

3. *Interpretasi*, yaitu proses penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada, dalam usaha merekonstruksi kejadian sejarah yang kemudian disusun secara sistematis logis, sehingga siap disajikan dalam bentuk kisah.
4. *Historiografi*, yaitu proses penulisan kisah sejarah yang ditulis dengan sistematis, kronologis, dan logis menggunakan bahasa yang baik dan benar.

#### **A. Teknik Pengumpulan Data**

Seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa proses pengumpulan data dalam kerangka penelitian sejarah sudah ditempuh pada tahapan heuristik. Adapun teknik pengumpulan data ditempuh melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan teknik system kartu.

#### **B. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
  - a. Menetapkan Topik  
Penetapan topik disusun berdasarkan sumber-sumber yang sudah dikumpulkan
  - b. Menetapkan Judul  
Berdasarkan sumber-sumber yang sudah dimiliki dan ditetapkannya tema, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan judul
  - c. Merumuskan Masalah  
Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peranan Sarekat Islam dan Muhammadiyah di bidang politik

- dan pendidikan pada masa pergerakan nasional
- d. Merumuskan Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, yaitu: 1) Mengetahui gambaran peranan Sarekat Islam di bidang politik pada masa pergerakan nasional, dan 2) Mengetahui gambaran Muhammadiyah di bidang pendidikan pada masa pergerakan nasional
  - e. Menentukan Sumber Informasi  
Sumber-sumber yang dikumpulkan berasal dari artikel jurnal dan sumber primer bahasa Belanda yang berbentuk digital
  - f. Menentukan Teknik Pengumpulan  
Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan
2. Pelaksanaan
- a. Heuristik  
Pengumpulan sumber dilakukan pada artikel jurnal nasional, buku-buku sejarah yang berhubungan, dan sumber bahasa Belanda yang didapat melalui internet
  - b. Kritik intern dan ekstern  
Proses kritik internal dilakukan setelah melakukan uji validasi sumber berupa data, artikel dan buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Proses kritik eksternal dilakukan setelah memperoleh data yang didapat melalui studi kepustakaan kemudian diolah dan uji kredibilitasnya dengan data yang terdapat dalam sumber-sumber yang telah di uji dalam proses kritik internal.
  - c. Interpretasi  
Tahap ini mencoba menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah didapat dari sumber-sumber yang dimiliki yang telah lolos dalam

tahapan kritik sumber, sehingga dapat membangun rekonstruksi peranan Sarekat Islam dan Muhammadiyah di bidang politik dan pendidikan pada masa pergerakan nasional.

- d. Historiografi  
Tahap ini dilakukan penulisan hasil penelitian yang diperoleh dengan gaya bahasa yang ilmiah, komunikatif dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Historiografi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari tujuan penelitian yang sudah dibuat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sarekat Islam sebagai Gerakan Politik

Asal usul dan pertumbuhan gerakan politik di kalangan Muslimin di Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal usul dan pertumbuhan Sarekat Islam (SI), terutama pada dua puluh tahun pertama sejak didirikan. Perkembangan SI dapat dibagi dalam empat bagian. Periode pertama, dari 1911 sampai 1916 yang memberi corak dan bentuk bagi organisasi tersebut; kedua, dari 1916 sampai 1921 yang dapat dikatakan merupakan periode puncak; ketiga, dari 1921 sampai 1927, periode konsolidasi, dan keempat, dari 1927 sampai 1942, yang memperlihatkan usaha partai untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia (Noer, 1992: 115).

Sarekat Islam (SI) didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1912. SI tumbuh dari organisasi yang mendahuluinya yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Ada dua macam sebab mengapa organisasi ini (SDI) didirikan. Pertama, kompetisi yang meningkat dalam bidang perdagangan batik terutama dengan golongan Cina, dan kedua sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia. Namun, untuk kasus ini bukan berarti

tidak ada pergesekan terhadap orang-orang Cina. Salah satu yang bisa dilihat adalah adanya kerusuhan jalanan yang dilakukan oleh anggota Sarekat Islam yang ditujukan terhadap orang-orang Cina yang tidak bisa ditoleransi lagi. Suasana ini juga ternyata membawa masyarakat di luar anggota Sarekat Islam untuk melakukan hal yang sama (Stibbe dan Stroomberg, 1932).

Pada tahun 1914, keanggotaan Sarekat Islam sudah menyebar ke luar pulau Jawa, sehingga bisa dikatakan pada saat itu organisasi ini memberikan pesan yang positif bagi masyarakat. Hal ini dikuatkan oleh Stibbe dan Stroomberg (1932) bahwa Sarekat Islam yang terkenal, awalnya mendirikan departemen di ibukota Palembang pada bulan November 1913 dan telah memiliki 10.000 anggota di wilayah ini pada akhir tahun 1914. Hal tersebut dapat terjadi karena organisasi ini memiliki semangat demokratis dan rasa solidaritas.

Perkembangan SI di Sumatera Selatan membawa organisasi ini bercabang, yaitu Sarekat Abang, Asosiasi Merah yang pada akhir tahun 1914 membangkitkan emosi di Rawas dan menyebar ke Jambi, di mana pada bulan Agustus-Oktober 1916 terjadi pemberontakan (Stibbe dan Stroomberg, 1932). Wulandari dan Ibrahim (2001:62) menambahkan bahwa terjadinya pemberontakan di Jambi dipimpin oleh dua orang bangsawan keturunan Sultan Jambi yaitu: Raden Toha dan Raden Mongong. Berita ini tersebar dan sampai ke Pasirah Abdul Hamid bin Setipal, yaitu presiden lokal SI di daerah Rawas Ilir, sehingga mengirim dua orang kurir, yaitu H. Lasyim dan H. Zakaria ke Jambi untuk meminta bantuan laskar, untuk menyerbu benteng Belanda di Surolangun Rawas.

Selama periode awal (1911-1916), SI mendapat sambutan positif dari rakyat Indonesia. Hanya dalam tempo singkat, SI telah berkembang dengan cepatnya dan terbuka untuk setiap orang Indonesia

tanpa memandang latar belakang sosioetnis mereka. Ekspansi Sarekat Islam tidak saja menembus sektor urban masyarakat Indonesia, tetapi juga kaum tani di pedesaan (Syafii, 1985: 80).

Perkembangan SI yang semakin membesar ini membahayakan posisi pemerintah kolonial. Namun pemimpin-pemimpin pemerintah berdalih bahwa suatu usaha frontal untuk memukul SI boleh jadi menimbulkan reaksi di kalangan rakyat Indonesia yang akan berbahaya. Bung Hatta pada tahun 1930 pernah menulis bahwa SI seakan-akan sebuah hotel umum di mana segala macam orang dapat berkumpul bersama untuk mengemukakan keluhan-keluhan dan membeberkan isi hati mereka (Hatta, 1972: 107).

A.W.F. Idenburg, Gubernur Jenderal pada tahun 1911-an, menyadari ancaman yang dibawa SI terhadap kekuasaan kolonial. Dengan alasan inilah dengan suatu undang-undang pada bulan Maret 1914, ia hanya memberikan pengakuan kepada berbagai cabang SI, tidak kepada SI sebagai satu kesatuan organisasi. Tindakan ini bertujuan untuk memecah SI dalam perserikatan-perserikatan kecil dan masing-masingnya akan berdiri bebas dan tidak ada hubungannya satu sama lain (Hatta, 1972: 108). Guna mengatasi undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti tersebut di atas, pada tahun 1915 di Yogyakarta, Cokroaminoto dan rekan-rekan pemimpin utama Sarekat Islam membentuk Central Sarekat Islam (CSI). Pemimpinnya adalah H.O.S. Cokroaminoto, Samanhudi diberi tempat sebagai ketua kehormatan, sedangkan Raden Goenawan dan Abdul Moeis duduk sebagai wakil ketua (Stibbe dan Stroomberg, 1932). CSI mendapat pengakuan pemerintah pada bulan Maret 1916. Untuk menghancurkan Sarekat Islam, Idenburg telah memberikan peluang kepada ideologi baru yang radikal, yaitu Marxisme untuk melakukan

infiltrasi terhadap SI melalui cabang-cabang Sarekat Islam di daerah.

Dalam kongres tahunan yang diselenggarakan tahun 1916, Cokroaminoto secara panjang lebar menguraikan perlunya pemerintahan sendiri untuk rakyat Indonesia. Sementara itu persoalan pertahanan Hindia mulai banyak dibicarakan oleh golongan kolonial tertentu sehingga terbentuk Komite Pertahanan Hindia. Orang mengatakan bahwa pertahanan Hindia ini berpengaruh terhadap proses kesadaran politik di Indonesia.

Pada bulan Juni 1916 di Bandung diadakan kongres pertama yang dihadiri oleh 80 SI lokal yang meliputi 360.000 orang anggota. Kongres itu merupakan "Kongres Nasional" karena SI mencita-citakan supaya penduduk Indonesia menjadi satu *natie* atau satu bangsa dengan kata lain mempersatukan etnik Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Sudah disebut di atas bahwa SI setuju diadakannya Komite Pertahanan Hindia asal pemerintah membentuk Dewan Rakyat (Pringgodigdo, 1964: 18).

Sebelum diadakan kongres SI kedua tahun 1917 di Jakarta muncul aliran revolusioner sosialis yang diwakili oleh Semaun yang pada waktu menjadi ketua SI lokal Semarang. Namun kongres itu tetap memutuskan bahwa asas perjuangan SI ialah mendapatkan pemerintahan sendiri. Dan ditetapkan asas kedua, yaitu berupa perjuangan melawan penjajahan dari kapitalisme yang jahat. Sejak kongres kedua ini Cokroaminoto dan Abdul Muis mewakili SI dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat).

Adanya wakil SI dalam *Volksraad* dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan tujuan SI (Maftuhin, dkk.2017:244). Tidak hanya tu, kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat melalui peraturan-peraturan yang akan dibuat bersama pemerintah kolonial Belanda (Nasihin, 2012:59). Harapan-harapan ini akan direalisasikan dengan cara melakukan diplomasi dan kerja sama

atau bersifat oposisi dengan anggota *Volksraad* lainnya (Noer, 1982:130).

Sekalipun pemerintah merasa cemas melihat perkembangan SI yang begitu cepat, namun tujuan jangka jauh dari gerakan ini bukanlah terang-terangan berupa kemerdekaan penuh, demi keamanan dan kelangsungan hidup SI. Sampai tahun 1917, tujuan yang hendak dicapai SI hanyalah pemerintahan sendiri secara berangsur bagi rakyat Indonesia. Maka untuk bergerak ke arah tujuan ini, SI harus membantu pemerintah dan menyiapkan pimpinan (Hatta, 1972: 111). Tetapi dalam kongresnya di Jakarta tahun 1917, tuntutan kemerdekaan telah diajukan sekalipun akan dicapai melalui revolusi (Vlekke, 1960: 354). Adanya tuntutan semacam ini menandakan bahwa SI sudah semakin radikal, dan memang sudah sering menyerang pejabat-pejabat pemerintah dengan cara-cara yang keras.

Kalangan pangreh praja menanggapi perkembangan Sarekat Islam yang spektakular dari dua arah yang berbeda. Bupati yang progresif mengharuskan supaya pangreh praja menduduki jabatan cabang SI dan mereka berpendapat bahwa perkembangan SI harus diterima secara wajar. Sedangkan bupati yang konservatif akan menolak kehadiran SI dan dianggapnya mengurangi kewibawaan dan mengancam kedudukannya (Suhartono, 1994: 35).

Tanggal 29 September sampai 6 Oktober 1918 dilakukan Kongres yang ketiga di Surabaya dengan dihadiri 450.000 anggota secara keseluruhan. Pada kongres ini isu-isu konstitusional dan ekonomi yang paling penting dibahas secara terbuka, tetapi dengan cara yang berbeda dari yang sebelumnya. Pada Kongres Nasional Pertama menunjukkan bahwa tindakan Sarekat Islam secara agresif ditujukan terhadap para pejabat, tetapi tidak terhadap Pemerintah. Kongres Kedua secara terbuka mengambil posisi menentang Pemerintah karena tidak ada reformasi besar yang diharapkan. Kongres ketiga memperjelas

bahwa sentimen revolusioner telah memperoleh karakter sosialis dengan sebuah front dibentuk untuk melawan Pemerintah. Hal ini menandakan perubahan taktik SI ke arah Sosialis-Marxis, dimana Teori Sosialis-Marxis juga pada dasarnya diterima sebagai alat yang terbukti memiliki nilai propaganda yang besar (Stibbe dan Stroommberg, 1932).

Pada tahun 1919 adalah periode pertempuran sengit melawan industri gula, kerusuhan Toli-Toli, drama Cimareme dan divisi B-case. Jumlah anggota Sarekat Islam telah meningkat menjadi dua juta, tetapi persatuan dipertahankan hanya dengan melanjutkan konsesi untuk kelompok kiri. Pada kongres yang diadakan di Surabaya tahun ini, Cokroaminoto juga melangkah lebih jauh dan menganjurkan pembentukan federasi serikat buruh yang revolusioner (De Indische Courant, 1932).

Pada tahun 1921, untuk mencegah keruntuhan organisasi, diterapkan prinsip disiplin partai, yaitu anggota Sarekat Islam tidak boleh merangkap sebagai anggota juga di perkumpulan politik lain. Hasil dari kongres yang diadakan di Surabaya tahun ini adalah Komunis mundur dari SI Banyak organisasi SI merah yang kemudian disebut Sarekat Rakyat bersekutu dengan para pemimpin Komunis.

Pada tahun 1923, SI diubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dengan prinsip nonkooperatif dalam pergerakannya. Lima tahun kemudian, PSI menyatakan sikap melawan penindasan yang dilakukan kolonial. Pada tahun 1927 Partai Sarekat Islam melakukan kerja sama dengan golongan nasionalis melalui Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Indonesia (PPPKI) (Suwondo, 1977:146). Pada tanggal 29-30 Maret 1929 Partai Sarekat Islam bersama anggota PPPKI memutuskan mengadakan demonstrasi menentang pasal 153 dan pasal 161 KUHP. Selain itu, juga diputuskan

mendirikan Fonds National untuk menyokong sekolah kebangsaan (Suwondo, 1977:132) dalam (Maftuhin, dkk., 2007).

Sejak munculnya gerakan persatuan 'nasionalis Indonesia' yang netral secara agama pada tahun 1927, minat penduduk terhadap Sarekat Islam semakin melemah. Pada kongres tahunan yang diadakan di Batavia pada tahun 1929 diputuskan untuk mengorganisir gerakan SI yang bertentangan dengan asas-asas undang-undang, menjadi satu perkumpulan tunggal dengan nama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Partai Sarekat Islam Indonesia memiliki 135 cabang dengan sekitar 30.000 anggota, sebagian besar di Jawa dan 5.000 di Sumatera (Blumberger, 1934). Tahun 1930, pengaruh Sarekat Islam telah mengalami pengurangan, hal ini dilihat pada kongres yang diadakan di Yogyakarta pada bulan Januari 1930, dimana hanya dihadiri oleh 150 orang pada pembukaannya (De Indische Courant, 1932).

## **B. Muhammadiyah sebagai Organisasi Sosial-Pendidikan**

Di antara gerakan-gerakan modernis Islam di seluruh dunia, Muhammadiyah adalah gerakan yang lebih hati-hati dan lebih lentur dalam menghadapi gelombang perubahan politik. Fenomena inilah yang memberikan kesan kepada aparat kolonial, sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa Muhammadiyah dipandang kurang berbahaya bagi kelangsungan kolonialisme. Dengan hati-hati mempertahankan watak ini, Muhammadiyah berhasil menghindari tindakan pemerintah yang dapat membawa kehancuran gerakan ini, sebagaimana yang dialami oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir.

Dari sudut penglihatan di atas, kebangkitan Muhammadiyah bukanlah semata-mata sebagai reaksi terhadap kegiatan misi Kristen yang agresif di

Jawa Tengah, tetapi masih banyak faktor-faktor penting lainnya yang menjadi latar belakang munculnya gerakan modernis ini. Menurut H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), ada tiga faktor yang mendorong lahirnya gerakan Muhammadiyah. *Pertama*, keterbelakangan dan kebodohan umat Islam Indonesia dalam hampir semua bidang kehidupan. *Kedua*, suasana kemiskinan yang parah yang diderita umat di suatu negeri kaya seperti Indonesia. *Ketiga*, kondisi pendidikan Islam yang sudah sangat kuno seperti yang terlihat pada pesantren (Hamka, 1952: 31). Berdasar kepada pernyataan Hamka, Muhammadiyah diharapkan akan mampu menawarkan satu alternatif bagi sistem pengajaran tradisional dalam rangka menyongsong hari depan Islam di Indonesia.

Menyadari sepenuhnya keadaan yang mengitari umat Islam selama periode kolonial, Dahlan melihat system Pendidikan Islam yang ada dianggap sudah tidak memadai. Ia sama sekali tidak mampu berhadapan dengan tantangan-tantangan baru yang ditopang oleh kekuasaan kolonial. Diilhami dan dicerahkan oleh gagasan-gagasan modernis Al-Afghani dan Abduh, Dahlan karenanya menjadi gelisah dan tidak sabar untuk memulai suatu gerakan yang lebih segar yang diberi nama Muhammadiyah, yang berarti pengikut Nabi Muhammad s.a.w dalam usaha memerangi keterbelakangan dalam masyarakat Islam. Di mata Dahlan, lapangan pendidikan harus diberi prioritas yang tinggi bila memang ingin melakukan pembangunan umat Islam.

Dengan munculnya Muhammadiyah diharapkan segala usaha yang mungkin untuk menerangi suasana yang suram itu dapat dilakukan. Dalam kerangka besar inilah Muhammadiyah ingin menghidupkan semangat ijtihad kembali dalam menelusuri dan mencari ajaran agama Islam sejati di tengah-

tengah hutan belukar tradisi yang sudah tua renta itu (Ma'arif, 1985: 68).

Berbeda dengan Budi Utomo yang menekankan perjuangan sosio-kultural, Muhammadiyah menekankan perjuangan sosio-religius. Segi-segi pengembangan masyarakat pada organisasi yang terakhir itu menjadi perhatian utama karena pada dasarnya kehidupan sosio masyarakat masih sangat terbelakang. Untuk memajukannya diperlukan perbaikan yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Perbaikan di bidang pendidikan ditempuhnya melalui cara baru yang lebih nyata. Pendidikan mempunyai fungsi yang lebih penting karena dengan pendidikan pemahaman tentang Islam mudah diwariskan kepada generasi berikutnya (Suhartono, 1994: 44).

Perbaikan pendidikan mencakup perbaikan dan pembentukan manusia muslim yang berbudi, alim, luas pengetahuannya dan paham masalah ilmu keduniaan dan kemasyarakatan. Sistem pendidikan dibangunnya dengan cara sendiri, menggabungkan cara tradisional dan cara modern. Model sekolah barat ditambah pelajaran agama yang dilakukan secara kelas akan lebih banyak mendapatkan hasil dalam proses belajar dan mengajar. Bidang kemasyarakatan yang ditempuhnya ialah dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola oleh lembaga-lembaga. Usaha dibidang sosial ini ditandai dengan berdirinya Pertolongan Kesengsaraan Umum (PKU) pada tahun 1923 dan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan tolong menolong secara muslim.

Langkah Muhammadiyah berkiprah pada sektor pendidikan, berawal dari keprihatinan terhadap peraturan pemerintah kolonial yang sangat membatasi keinginan masyarakat pribumi untuk mengikuti pendidikan, dan juga ketidakseimbangan dalam jumlah subsidi. Mesteko (1986:32) mengemukakan bahwa perbedaan jumlah

subsidi dari pemerintah kolonial Belanda dalam mengaplikasikan Politik Etis di bidang edukasi. *Eropeesche Lager School* (ELS) dengan murid hanya berjumlah 2.500, yang terdiri atas anak Eropa dan bangsawan, mendapat subsidi f. 2.677.000. Sebaliknya, Sekolah Rendah Pribumi, dengan murid berjumlah 162.000 Muslim, hanya mendapatkan subsidi sebanyak f. 1.399.000. Demikian praktik sistem 'balas budi' penjajah terhadap pribumi muslim yang terjajah (Mesteko, 1986: 32).

Pendirian sekolah Pribumi oleh pemerintah kolonial Belanda hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdidik untuk dipekerjakan di perkebunan dan pertambangan, serta proyek penjajahan lainnya. Apabila kebutuhan tenaga kerja telah terpenuhi, sekolah ditutup. Sikap Belanda yang demikian, organisasi Muhammadiyah merasa terganggu untuk mengatasinya.

Di bawah tantangan sistem pendidikan yang demikian, organisasi Muhammadiyah menjawabnya dengan mendirikan sekolah yang serupa tetapi tidak sama kurikulumnya. Kurikulum sekolah organisasi Muhammadiyah berbeda dengan kurikulum sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perbedaannya, di sekolah organisasi Muhammadiyah ada mata pelajaran Alquran.

Pendirian sekolah Muhammadiyah pada saat itu mengikuti sistem sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Selain adanya Sekolah Desa atau Sekolah Rendah Angka Dua (*Tweede Klase*) atau Sekolah Bumiputra (*Inlandsche School*), sudah mulai didirikan Sekolah Rendah Kelas Satu, yang disebut *Hollandsche Indische School* (HIS) pada 1914. Pada saat itu, Belanda tidak hanya melakukan politik pecah belah di sektor politik saja, tetapi juga di sektor pendidikan.

HIS Muhammadiyah yang disebut HIS *met de Quran* berupaya

mengimbangi sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun pada masa penjajahan, organisasi Muhammadiyah tidak mungkin mendirikan perguruan tinggi. Baru, pada masa pendudukan Jepang, organisasi Muhammadiyah mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta dengan Rektor Kahar Moezakkir.

Dengan semakin meluasnya pengaruh organisasi Muhammadiyah dengan berbagai sekolah yang didirikannya, tidak hanya di Jawa, maka pemerintah kolonial Belanda mencoba menghentikan gerak kemajuannya melalui *Staatsblad* 1932, No. 494 tentang *Onderwijs Ordonantie* Sekolah Partikelir yang disebut pula sebagai *Wilde School Ordonantie* atau Ordonansi Sekolah Liar 1932 (Noer, 1996: 99). Ordonansi ini tidak hanya ditujukan pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama (Jawa Barat) dan Nahdlatul Wathon (Jawa Timur) semata, tetapi juga dikenakan terhadap sekolah Taman Siswa.

Peran Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan pada masa pergerakan nasional terbilang cukup bagus karena meningkatnya jumlah sekolah yang didirikannya, sehingga pemberantasan buta huruf dapat dilakukan dengan baik melalui terselenggaranya pendidikan ini. Pada tahun 1923 di Yogyakarta berdiri 4 sekolah angka dua sebanyak 5 kelas, sebuah sekolah angka satu (HIS), dan sekolah calon guru satu buah, serta mempunyai sebuah madrasah. Berdasarkan data tersebut tercatat 1084 orang peserta didik dan 48 orang guru. (Departemen Penerangan R.I., 2008: 132).

Pada tahun 1925, Muhammadiyah meningkatkan kembali kontribusinya di bidang pendidikan, yaitu mempunyai 29 cabang-cabang dengan 4.000 orang anggota. Berdiri juga delapan Holland Inlandse School, sebuah sekolah guru di

Yogyakarta, 32 buah sekolah dasar lima tahun, sebuah Schakelschool, 14 madrasah, seluruhnya dengan 119 orang guru dan 4000 orang peserta didik (Stibbe dan Stroomberg, 1932). Pada akhir tahun 1929, Muhammadiyah memiliki sekitar 80 sekolah di Yogyakarta, 35 di Surakarta dan 11 sekolah di Batavia. Bagian perempuan 'Aisyiyah juga melakukan perannya dalam pendidikan seperti melaksanakan kursus untuk perempuan dan anak perempuan, di mana pendidikan praktis, termasuk kerajinan tangan juga diberikan. (Stibbe dan Stroomberg, 1932).

Pada tahun 1932 Muhammadiyah sudah memiliki 103 *Volkschool*, 47 *Standaardschool*, 69 *Hollands Inlandse School (HIS)*, dan 25 *Schakelschool* (Hadikusuma, TT:34). Pada tahun 1934-1936 Muhammadiyah membuka sekolah *Volkschool* yang memiliki persyaratan dan kurikulum yang sama dengan *Volkschool Gubernemen* dan *Vervolgschool* Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Hal ini selanjutnya berkembang terutama di Jawa. Dibuka juga *Hollands Inlandse School met de Quran* Muhammadiyah untuk menandingi usaha Katolik yang telah mendirikan *HIS met de Bijbel* (Hadikusuma, TT:33). Pada tahun 1937 Muhammadiyah sudah memiliki 986 lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik sebanyak 160.182 orang (Mulkhan, 2010:88).

## KESIMPULAN

Sarekat Islam (SI) adalah satu diantara organisasi politik Indonesia abad ke-20 yang paling menonjol. Berbeda dengan Muhammadiyah yang bercorak sosio-keagamaan dan pendidikan, SI sejak awal kelahirannya sudah merupakan gerakan politik.

Di antara gerakan-gerakan modernis Islam di seluruh dunia, Muhammadiyah adalah gerakan yang lebih hati-hati dan lebih lentur dalam

menghadapi gelombang perubahan politik. Fenomena inilah yang memberikan kesan kepada aparat kolonial bahwa Muhammadiyah dipandang kurang berbahaya bagi kelangsungan kolonialisme. Padahal dengan kiprahnya di jalur sosial pendidikan, gerakan Muhammadiyah akan sangat berbahaya bagi kelanggengan kolonialisme Belanda. Sebab kiprah Muhammadiyah di bidang sosial-pendidikan akan segera memberikan kesadaran intelektual kepada pengikutnya yang akan berdampak terhadap kekuasaan kolonial. Dengan hati-hati mempertahankan watak ini, Muhammadiyah berhasil menghindari tindakan pemerintah yang dapat membawa kehancuran dari gerakannya.

Selama periode awal, tampaknya antara kedua kubu modernis (SI dan Muhammadiyah) seakan-akan telah diciptakan pembagian kerja: Muhammadiyah terutama bergerak di bidang sosial-pendidikan dan keagamaan, sedangkan SI di bidang politik. Muhammadiyah dan SI mempunyai tujuan jangka panjang yang sama, yaitu Islamisasi yang semakin mantap bagi masyarakat Indonesia. Untuk tujuan jangka jauh ini, maka kemerdekaan tanah air merupakan hal yang mutlak.

Dalam perkembangannya, baik SI maupun Muhammadiyah mempunyai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan rakyat Indonesia, sedangkan yang membedakannya adalah strategi yang ditempuhnya. SI menempuh strategi perjuangan dengan politik, di samping agama yang dijadikan sebagai panji dari perjuangannya. Sementara Muhammadiyah berjuang berpanjikan agama dengan harapan ada perbaikan kehidupan sosial-pendidikan dari rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, MT. 1990. *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Surakarta: IGPFBS & KS
- Blumberger, Petrus. 1934. *Politieke partijen en stroomingen in nederlandsch-indie*. Amsterdam : N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij Leiden
- De Indische Courant. 1932. *Een Jubileum En Een Proces*. Surabaya
- Departemen Penerangan RI, 1986, *Siapa Yang Tidak tahu Muhammadiyah*, Jakarta.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Hadikusuma, Djarnawi. TT. *Matahari-Matahari Muhammadiyah*. Yogyakarta: Persatuan.
- Hamka. (1952). *Tasawuf Modern*. Jayabakti: Jakarta.
- Hanifah, Abu. 2007. 2010. *Peran Muhammadiyah Dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1912-1942*. Tesis: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Hasyim, Umar, 1990, *Muhammadiyah Jalan lurus*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Hatta, Muhammad. (1972). *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Tintamas: Jakarta.
- Maftuhin, Sumarjono, dan Umamah, Nurul. 2017. *The Movement Of Sarekat Islam's Politics In Struggling National Independence In 1918-1945*. Jurnal Historica. Vol. 1 No. 2
- Mesteko, Soemarsono. (1986). *Mohammad Roem 70 Tahun: Pejuang Perunding*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Mulawarman, A.D. 2015. *Jang Oetama, Jejak dan Perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto*. Yogyakarta: Galang Pustakka.
- Mulkan, Abdul Munir, 2010, *Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah
- Nasihin. 2012. *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noer, D. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Noer, Deliar. (1988) *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES. (Jakarta: 1988).
- Noer, Deliar. (1992). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES: Jakarta.
- Noer, Deliar.(1996). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Mizan: Bandung.
- Pringgodigdo. (1964). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Pustaka Rakyat: Jakarta.
- Sairin, Weineta, 1995, *Gerakan Pembaharuan muhammadiyah*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Stibbe, D. G. dan Stroomborg, J. 1932. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Belanda: s-Gravenhage
- Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Gajah Mada University: Yogyakarta.
- Suwarno. 2011. *Latar Belakang dan Fase Awal Pertumbuhan Kesadaran Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafii, Ma'arif, Ahmad. (1985). *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*. LP3ES: Jakarta.
- Vlekke, Bernard H.M. (1960). *Nusantara A History of Indonesia*. Manteau: Bruxelles
- Wulandari, Triana dan Ibrahim, Muchtaruddin. 2001. *Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Oirektorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasiona
- Yasmis. 2009. *Sarikat Islam Dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1912-1927)* Jurnal Sejarah Lontar 31 Vol. 6 No. 1